

**KENDALA JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM MELAKSANAKAN
LELANG EKSEKUSI TERDAHAP BARANG RAMPASAN NEGARA
YANG MEMILIKI STATUS SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

(Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

YOGA NURDIANTO

NIM. 105010107111049



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul artikel ilmiah : Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melakukan
Lelang Eksekusi Terhadap Barang Rampasan
Negara yang Memiliki Status Sebagai Jaminan
Fidusia (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)**

Identitas Penulis

a. Nama : Yoga Nurdianto
b. NIM : 105010107111049

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui Tanggal : 04 Februari 2014

Pembimbing Utama

pembimbing pendamping

Dr. Ismail Navianto, SH. M.H

M. Hamidi Masykur, SH. MKn

NIP. 19550212 198503 1 003

NIP. 19800419 200812 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. MH

NIP. 195904061986012001

**KENDALA JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM MELAKSANAKAN
LELANG EKSEKUSI TERHADAP BARANG RAMPASAN NEGARA
YANG MEMILIKI STATUS SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

(Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

Yoga Nurdianto, Dr. Ismail Navianto, SH. M.H, M. Hamidi Masykur, SH. MKn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Yoganurdianto6@yahoo.co.id

ABSTRAK

YOGA NURDIANTO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, “Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melakukan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Negara yang Memiliki Status Sebagai Jaminan Fidusia (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)” , pelaksanaan putusan pengadilan mengenai barang rampasan yang masih memiliki status jaminan fidusia sangatlah pelik bagi jaksa yang melakukan eksekusi di kejaksaan Malang. Meski pengaturan tata cara lelang sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan. Namun masalah tetap timbul sebab disini terdapat dua kepentingan perdata dan pidana. Masalah yang diteliti : (1) Kendala bagi jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang rampasanyang berstatus jaminan fidusia di Kejaksaan Negeri Malang; dan (2) upaya yang dapat dilakukan jaksa eksekutor terkait kendala pada point 1.

Hal yang menjadi dasar penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelelangan yang dilaksanakan oleh jaksa, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa eksekutor dalam mengeksekusi barang rampasan.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran situs-situs internet yang erat kaitannya dengan leang eksekusi yang dilakukan jaksa. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban bahwa prosedur pelaksanaan lelang oleh jaksa diatur dalam STANDAR OPERATION PROSEDURE (SOP) yang memiliki dasar hukumsurat edaran nomor : SE-03/B/B.5/8/1988. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yuridis maupun non yuridis dalam pelaksanaan lelang eksekusi tersebut, untuk kendala yuridis diantaranya ialah tidak berjalannya pasal 111 KUHP, Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP. Sedangkan untuk kendala non yuridis, diantaranya ialah tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus

barang rampasan yang akan dilelang, Tempat penyimpanan yang kurang memadai, Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan, dan Monopoli lelang oleh pihak Finance.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah jaksa dapat melakukan banding khusus barang bukti, diharapkan ada aturan khusus dalam KUHP tentang pengaturan lelang barang rampasan, diharapkan ada anggaran khusus dari pemerintah dan kejaksaan menyisihkan anggaran tahunannya untuk memperbaiki fasilitas tempat penyimpanan, kejaksaan telah mengupayakan pemasangan kanopi untuk melindungi nilai ekonomi barang rampasan, kejaksaan dapat menelepon ataupun bertanya langsung terkait putusan eksekusi lelang dari pengadilan, jaksa mengumumkan lelang melalui media cetak (koran).

ABSTRACT

YOGA Nurdianto, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2014, "Constraints Attorney As Executor In Doing Auctions Execution Against Goods Confiscated State Has Fiduciary Status As (Studies in Malang District Attorney)", execution of court decisions regarding who still booty have fiduciary status is very complicated for the prosecutor in the prosecutor's execution Malang. Although setting the auction procedures already stipulated in the Attorney General number : SE-03/B/B.5/8/1988 on completion of booty. But the problem still arises here because there are two civil and criminal interests. Problems examined : (1) the prosecutor as executor obstacle in implementing the court verdict related to auction rampasanyang fiduciary status in Malang District Attorney, and (2) efforts to be made executor prosecutors related constraints on point 1.

It is the basis of this study aimed to determine and analyze the auction procedures that are carried out by the prosecutor, as well as to identify and analyze the obstacles faced and the efforts to overcome the obstacles that are conducted by the Attorney executors in executing booty.

The method used socio-juridical approach, using primary and secondary data. The primary data obtained through interviews. Secondary data were obtained by means of literature study, study documentation, and tracking Internet sites that are closely related to the execution carried leang prosecutor. Then, all data and information processed by using descriptive qualitative data analysis techniques.

Based on the results of the study authors obtained answers that the conduct of the auction procedures set by the prosecutor in the STANDARD OPERATION Procedure (SOP) which has a circular base hukumsurat number : SE-03/B/B.5/8/1988. However, in practice there is a judicial or non- judicial obstacles in the execution of the auction, for a juridical constraints such is not the passage of Article 111 of the Criminal Code, no specific rules governing the auction booty in the Criminal Code. As for the non- juridical constraints, such is the lack of

specific government budget spoils to be auctioned, storage is inadequate, delay in receipt of the decision of the court, and Monopoly auction by the Finance.

The efforts made to overcome these obstacles is a special prosecutor can appeal evidence, expected no specific rules in the Code of booty auction setting, it is expected there is a special budget from the government and the prosecutor's annual budget set aside to improve the storage facility, the prosecutor has sought the installation canopy to protect the economic value of the booty, the prosecutor can call or ask directly related to the auction execution verdict of the court, the prosecutor announced the auction through the print media (newspapers).

A. Pendahuluan

Di negara Indonesia antara hukum pidana dan hukum perdata tidak ada yang diunggulkan, artinya antara hukum pidana dan hukum perdata berjalan seimbang. Ada kalanya suatu kasus kejahatan melibatkan hukum pidana dan hukum perdata, kedua hukum ini saling memiliki kepentingan atas barang yang menjadi sarana kejahatan. Maka akan timbul sebuah pertanyaan, manakah yang harus diutamakan dari hukum pidana atau hukum perdata, dan apakah ada jalan tengah dalam penyelesaian kasusnya.

Kasus yang sering timbul terkait masalah diatas adalah kasus jaminan fidusia, ini karena banyaknya lembaga yang memberikan kredit dengan jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia sendiri adalah [jaminan kebendaan](#) atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

Jaminan fidusia diberikan sesuai kredit yang diberikan bahkan di prakteknya jaminan fidusia lebih tinggi nilainya dari kredit yang diberikan. Masalah akan timbul apabila barang yang dijaminakan tersebut dibuat untuk melakukan / sarana kejahatan sehingga dirampas oleh negara. Arti benda rampasan negara itu sendiri memiliki arti benda yang dirampas oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk merampas barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang Rampasan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara.

Disini akan terjadi suatu penumpukan kepentingan antara kepentingan privat (debitur – kreditur) disisi lain adanya kepentingan publik (tersangka dan negara). Judul ini sangat menarik untuk ditelusuri karena kejaksan agung baru mengeluarkan surat edaran terkait barang sitaan yang merupakan jaminan fidusia. Dari judul seperti ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi pidana dan sisi perdata. Disini penulis menitik beratkan pada sisi pidananya.

Untuk menjawab masalah ini kejaksan agung mengeluarkan surat edaran Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan terkait masalah ini, namun surat edaran tersebut masih terbilang sukar untuk dilaksanakan oleh jaksa. Untuk itu diperlukan sosialisasi ataupun pembelajaran lebih dalam bagi para jaksa penuntut umum. Yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah bagaimana atau apa saja kendala yang dihadapi jaksa dalam menjalankan surat edaran kejaksan agung itu sendiri.

B. Permasalahan

1. Apa kendala yang dihadapi jaksa dalam proses lelang eksekutor terkait barang rampasan yang merupakan jaminan fidusia ?
2. Apa upaya yang dilakukan jaksa terkait kendala dalam proses lelang eksekutor terkait barang rampasan yang merupakan jaminan fidusia ?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹

b. Jenis Pendekatan

¹ Ronny Haninjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hlm 18.

Dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji suatu masalah di dalam masyarakat atau lingkungan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, serta menemukan masalah yang selanjutnya dilakukan pengidentifikasikan masalah sekaligus mencari penyelesaian masalah dari segi hukum dan sistematikanya.²

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan prasurvey bahwa di Kejaksaan Negeri Malang telah dilakukan lelang barang rampasan yang berstatus jaminan fidusia.

d. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden.³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. untuk memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan kendala jaksa selaku eksekutor dalam mengeksekusi barang rampasan yang berstatus jaminan fidusia di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986, Hlm 10.

³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm 12.

adalah data yang dihimpun dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran internet yang berhubungan dan terkait dengan kendala jaksa selaku eksekutor dalam mengeksekusi barang rampasan yang berstatus jaminan fidusia di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, perolehan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan. Teknik memperoleh data ini digunakan untuk memperoleh data primer. Penelitian lapangan ini memakai teknik perolehan data sebagai berikut.

a. Data Primer diperoleh dari:

1) Wawancara

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik interview yaitu wawancara secara langsung dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Jaksa Fungsional Pidana Umum, Staf Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Malang. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Jadi wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Metode wawancara yang dilakukan adalah dengan cara melihat, mendengarkan, mencatat, dan merekam hasil penjelasan Jaksa selaku eksekutor dari subjek yang diwawancarai tersebut.

Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang :

- a) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
- b) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- c) Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
- d) Solusi yang dilakukan oleh pihak – pihak, baik tanpa konflik mau pun dalam hal terjadi konflik.
- e) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.⁴

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.⁵

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena – fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Melakukan observasi memungkinkan gejala – gejala penelitian dapat diamati dari dekat. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja di Kejaksaan Negeri Malang dalam melaksanakan putusan pengadilan oleh Jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang sitaan yang berstatus jaminan fidusia, serta dalam mengatasi kendala Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang sitaan yang berstatus jaminan fidusia.

b. Data Sekunder diperoleh dari:

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 86.

⁵ *Ibid.*, hlm 85.

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui dokumen atau arsip – arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Melalui teknik perolehan data ini, peneliti memperoleh data dengan cara mencatat, menyalin ataupun meringkas dokumen – dokumen dan juga surat – surat, serta situs – situs di internet yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi ini adalah data – data mengenai kondisi dan hal – hal yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan, serta kendala Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan oleh Jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang sitaan yang berstatus jaminan fidusia di Kejaksaan Negeri Malang.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan (objek) yang akan diteliti⁶, yang terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor terkait dengan lelang barang sitaan yang berstatus jaminan fidusia. Juga kendala Jaksa selaku eksekutor di dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan lelang barang sitaan yang berstatus jaminan fidusia tersebut di Kejaksaan Negeri Malang, yang bertujuan untuk mengatasi kendala – kendala bagi Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jaksa / penuntut umum di Kejaksaan Negeri Malang.

Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang – orang yang dianggap ahli.⁷ Sampel dalam penelitian ini adalah tiga jaksa / penuntut umum bagian pidana umum yang pernah melaksanakan

⁶ Bambang Prasetyo, **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 119.

⁷ *Ibid.*

lelang barang sitaan yang berstatus jaminan fidusia di Kejaksaan Negeri Malang.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁸ Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan rumusan – rumusan dan pengertian – pengertian terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan.

4. Definisi Operasional

- a. Yang dimaksud kendala dalam penelitian ini adalah hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Jaksa di Kejaksaan Negeri Malang.
- b. Jaksa Eksekutor adalah jaksa / penuntut umum sebagai pelaksana eksekusi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di Kejaksaan Negeri Malang.
- c. Putusan Pengadilan adalah putusan pengadilan negeri Malang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berupa pelaksanaan terkait dengan lelang barang rampasan di kejaksaan Negeri Malang.
- d. Lelang adalah penjualan barang rampasan yang terbuka untuk umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang

⁸ Abdulkadir Muhammad, Op, cit, hal 172.

didahului dengan usaha mengumpulkan peminat di Kejaksaan Negeri Malang.

- e. Barang Sitaan adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilalang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. pembahasan

- a. kendala yang dihadapi jaksa dalam proses lelang eksekutor terkait barang rampasan yang merupakan jaminan fidusia

meski sudah di awal bahwa putusan pengadilan mengenai lelang barang rampasan yang berstatus jaminan fidusia langsung dapat dilaksanakan eksekusi oleh jaksa. Namun dalam proses lelang tersebut pastilah ada hambatan teknis maupun non teknis.

Sesuai dengan informasi dari sebagian jaksa pada bagian pembinaan, seksi pidana umum dan seksi pemberkasan dalam hal ini sebagai narasumber di kejaksaan negeri malang. Berdasarkan narasumber bahwa pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor dalam melakukan penjualan lelang barang yang rampasan yang berstatus jaminan fidusia menemui bermacam – macam kendala untuk dilakukan. Adapun kendala – kendala yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1) kendala yuridis

- a) tidak berjalannya pasal 39 KUHP

dalam praktik lapangan apabila barang tersebut berhubungan dengan finance (pihak ketiga) selaku pemegang hak jaminan fidusia maka, putusan hakim ada yang mengembalikan barang rampasan meskipun itu sarana kejahatan. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 39 KUHP, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Jaksa selaku eksekutor barang rampasan yang berstatus jaminan

fidusia mengalami kendala untuk mengeksekusi barang rampasan tersebut.

Perlu dipertegas bahwa barang rampasan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap, kekuatan hukum yang tetap ini berasal dari keputusan hakim.⁹

- b) Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP

Jaksa selaku eksekutor barang rampasan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dengan acuan dari surat edaran ini bagi jaksa terbilang sangat minim. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi hukum acara pidana.

- 2) kendala non yuridis

- a) tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus barang rampasan yang akan dilelang

Di kejaksan malang tidak ada anggaran khusus untuk perawatan barang rampasan yang akan dilakukan lelang. Kurangnya anggaran ini dapat berdampak pada menurunnya kondisi barang rampasan tersebut. Barang rampasan yang dapat rusak adalah kendaraan bermotor, kerusakan yang sering terjadi adalah kerusakan pada mesin kendaraan. Kendaraan bermotor idealnya dilakukan perawatan secara rutin setiap hari dengan cara memanasi mesin kendaraan. mengingat proses persidangan sangat cukup lama, maka pergantian oli diperlukan.

Akibat kurangnya perawatan ini membuat harga barang rampasan yang akan dilelang menjadi menurun. Kendala jaksa disini tidak mendapatkan nilai nominal barang yang seharusnya, karena

⁹ Wawancara dengan jaksa Ari Kuswadi, SH

kondisi barang rampasan yang menurun. Kendala jaksa ini berakibat juga pada pendapatan negara.

b) Tempat penyimpanan yang kurang memadai

Benda Rampasan yang disimpan di Kejaksaan hanya di letakan di tempat yang terbuka, untuk mobil diletakkan di halaman Kejaksaan bagian dalam dan untuk motor diletakkan dipojok belakang halaman Kejaksaan yang diberi pengamanan pagar tinggi tanpa atap. Sedangkan untuk benda yang berukuran kecil, memiliki nilai ekonomis diletakkan disebuah ruang barang bukti, tanpa ada pengkhususan sebelumnya. Disini benda rampasan yang berada di tempat terbuka (halaman Kejaksaan) tidak terdapat perlindungan dari cuaca sehingga mengurai dari kualitas fisik mobil terutama cat serta kondisi mesin. Hal ini terjadi karena tidak terdapatnya kanopi yang melindungi dari panas dan hujan.

Kurangnya tempat penyimpanan ini mengakibatkan tidak adanya pemisahan antara barang rampasan dan barang sitaan. Tidak adanya pemisahan ini membuat jaksa kesulitan untuk menyiapkan barang rampasan yang akan dilelang. Untuk menyiapkan barang rampasan jaksa membutuhkan waktu satu hari. Dengan berkurangnya waktu berarti berkuranglah waktu pemrosesan lelang yang sebelumnya sudah minim.

c) Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan

Masalah yang sering dialami jaksa selaku eksekutor tidak lepas dari keterlambatan penerimaan keputusan pengadilan. Keterlambatan ini disebabkan berbagai hal, namun yang paling berperan besar disebabkan kelalaian dari panitera pengadilan negeri malang. Peran panitera ini sangat vital sebab kesalahan sedikit apapun yang dilakukan panitera, akan berdampak besar pada saat eksekusi yang dilakukan oleh jaksa.

- b. Upaya yang dilakukan jaksa dalam proses lelang eksekutor terkait barang rampasan yang merupakan jaminan fidusia

1) Upaya dalam kendala yuridis

a) Upaya tidak berjalannya pasal 39 KUHP

Dalam pengadilan tingkat pertama, hakim memutuskan mengembalikan barang rampasan pada pihak finance. Pengembalian barang rampasan ini didasarkan pada pertimbangan subjektif hakim. Jaksa selaku penuntut umum dapat melakukan upaya hukum yaitu melakukan banding khusus barang bukti (sebagian putusan pengadilan). Dasar jaksa penuntut umum melakukan banding barang bukti karena, jaksa penuntut umum sudah berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut merupakan sara kejahatan sehingga barang bukti tersebut selayaknya dijadikan barang rampasan dan segera dilelang untuk negara apabila barang rampasan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Banding khusus barang bukti ini memiliki prosedur yang sama dengan prosedur banding pada umumnya. Pada banding khusus barang bukti yang dilakukan banding hanya pada barang bukti, sedangkan untuk keputusan hakim yang lain dapat diterima.¹⁰

Barang rampasan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan melalui SOP penanganan barang rampasan di kejaksaan, barang rampasan tetap dilelang meskipun berstatus jaminan fidusia. Sehingga pihak ketiga yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut tidak dapat mengupayakan apapun untuk mengambil haknya, yang berupa pengembalian barang rampasan yang dilelang oleh kejaksaan.¹¹

b) Upaya Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP

¹⁰ Wawancara dengan jaksa Hartono, SH

¹¹ Wawancara dengan jaksa Ari Kuswadi, SH

Diharapkan dalam bagi pembuat undang-undang untuk lebih kompleks dalam pengaturan peraturan, khususnya aturan mengenai lelang barang rampasan dalam KUHP

2) Untuk masalah non yuridis

a) Upaya dari kurangnya anggaran

Diharapkan adanya anggaran khusus untuk perawatan barang rampasan. Kejaksaan menyisihkan anggarannya untuk memperbaiki fasilitas terkait tempat penyimpanan barang rampasan.

b) Upaya Tempat penyimpanan yang kurang memadai

Kejaksaan negeri malang telah mengupayakan pemasangan kanopi untuk tempat barang rampasan dan sitaan yang berupa kendaraan sepeda motor. Pemasangan kanopi ini dianggarkan dari dana kejaksaan secara khusus tanpa ada bantuan dana dari negara. Sedangkan untuk kendaraan mobil tetap diletakkan di halaman dalam kejaksaan negeri malang.

c) Upaya Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan

Keterlambatan penerimaan putusan, jaksa dapat menanyakan secara langsung terkait putusan tersebut atau melalui telepon ataupun surat.

d) Upaya Monopoli lelang oleh pihak Finance

Kejaksaan selalu memberikan pengumuman terkait akan adanya lelang barang rampasan oleh kejaksaan pada media cetak.

D. Penutup

a. Kesimpulan

- 1) Kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan lelang eksekusi terbagi menjadi dua, yaitu: kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis meliputi, tidak berjalannya pasal 39 KUHP dan Tidak ada aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP,

sedangkan untuk kendala non yuridis ditemukan 4 kendala, yaitu: tidak adanya anggaran dari pemerintah khusus barang rampasan yang akan dilelang, Tempat penyimpanan yang kurang memadai, Keterlambatan penerimaan putusan pengadilan dan Monopoli lelang oleh pihak Finance.

- 2) Upaya yang dapat dilakukan jaksa juga terbagi dua yaitu, upaya yuridis dan upaya non yuridis. Upaya yuridis antara lain: untuk mengatasi kendala tidak berjalannya pasal 39 KUHP, Jaksa selaku penuntut umum dapat melakukan upaya hukum yaitu melakukan banding khusus barang bukti (sebagian putusan pengadilan). Diharapkan dalam bagi pembuat undang-undang untuk lebih kompleks dalam pengaturan peraturan, khususnya aturan mengenai lelang barang rampasan dalam KUHP. Upaya dalam kendala non yuridis meliputi: diharapkan adanya anggaran khusus untuk perawatan barang rampasan, kejaksan telah memberikan kanopi untuk meminimalisir berkurangnya nilai ekonomi barang rampasan, jaksa dapat bertanya secara langsung pada panitera terkait keterlambatan penerimaan putusan pengadilan, jaksa sudah mengumumkan lelang yang dilakukan kejaksan pada media cetak (koran).

b. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan aturan khusus terhadap pengelolaan barang rampasan yang terkait jaminan fidusia. Aturan yang sebaiknya dibuat kelak dapat melindungi pihak yang merasa dirugikan atas lelang yang dilakukan kejaksan, terutama yang berhubungan dengan jaminan fidusia.
2. Kejaksan dapat mengalokasikan anggaran tahunan untuk dipergunakan sebagai anggaran perawatan barang rampasan. Alokasi anggaran ini sangat

diperlukan karena dapat mencegah terjadinya pengurangan nilai ekonomis suatu barang rampasan.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Ronny Haninjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.